Available online at **HISTORIA**; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah
Journal homepage: https://ejournal.upi.edu/index.php/historia

RESEARCH ARTICLE

Ratu Pelabuhan: Ketidakadilan Air, Kapitalisme Perkebunan, dan Gerakan Mesianistik di Sukabumi pada 1906

Muhammad Miqdad Rojab Munigar[1], Reiza D. Dienaputra[2]
[1]Program Magister Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran
[2]Departemen Ilmu Sejarah dan Filologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran
Correspondence author: muhammad24495@mail.unpad.ac.id

To cite this article: Munigar, M. M. R., & Dienaputra, R. D. (2026). Ratu Pelabuhan: Ketidakadilan air, kapitalisme perkebunan, dan gerakan mesianistik di Sukabumi pada 1906. *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 9*(1), 61–72. https://doi.org/10.17509/historia.v9i1.82089.

Naskah diterima : 9 April 2025, Naskah direvisi : 20 April 2026, Naskah disetujui : 30 April 2026

Abstract
Messianic movements in colonial Indonesia have largely been interpreted through religious, millenarian, or anti-colonial perspectives, overlooking the ecological conditions that shaped collective resistance. This study reinterprets the 1906 Rachman Movement in Sukabumi through the lens of the political ecology of water, examining how water injustice contributed to rural mobilization. Using historical methods, including heuristic source collection, source criticism, interpretation, and historiography, the study analyzes colonial administrative reports and seventeen contemporary newspaper articles published between January and July 1907. The findings reveal that the movement was driven not primarily by religious fanaticism but by structural inequalities in irrigation access. The collusion between colonial authorities and local elites diverted water to private estates and tea plantations, marginalizing local farmers and intensifying agrarian tensions. The colonial government's failure to resolve these grievances transformed ecological injustice into collective resistance, while Rachman's messianic claim as the Ratu Pelabuhan served as a political idiom that legitimized resistance against colonial agrarian exploitation. By integrating environmental history and political ecology, this study challenges conventional interpretations of Indonesian messianic movements and demonstrates that ecological injustice was a key driver of rural resistance in the late colonial period.

Keywords: Agrarian Conflict; Messianic Movement; Political Ecology; Rachman Movement; Water Injustice.

Abstrak
Gerakan mesianistik di Indonesia pada masa kolonial umumnya ditafsirkan melalui perspektif keagamaan, milenarianisme, atau perlawanan antikolonial, sementara dimensi ekologis yang melatarbelakangi mobilisasi masyarakat masih jarang dikaji. Penelitian ini bertujuan mereinterpretasi Gerakan Rachman di Sukabumi tahun 1906 melalui perspektif politik ekologi air dengan menelaah hubungan antara ketidakadilan distribusi air dan perlawanan masyarakat. Penelitian menggunakan metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dengan memanfaatkan laporan administrasi kolonial serta tujuh belas artikel surat kabar sezaman yang terbit pada Januari–Juli 1907. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan ini dipicu bukan terutama oleh fanatisme keagamaan, melainkan oleh ketimpangan distribusi air akibat kolusi pejabat kolonial dan elite lokal yang mengalihkan aliran irigasi ke lahan swasta dan perkebunan teh. Ketidakadilan tersebut memicu ketegangan agraria dan berkembang menjadi perlawanan kolektif, sementara klaim mesianistik Rachman sebagai Ratu Pelabuhan berfungsi sebagai bahasa politik untuk melegitimasi tuntutan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa mesianisme merupakan bentuk artikulasi ketidakadilan ekologis dan agraria, sekaligus memperkaya historiografi gerakan sosial kolonial melalui integrasi perspektif sejarah lingkungan dan politik ekologi.

Kata Kunci : Ekologi Politik; Gerakan Mesianistik; Gerakan Rachman; Ketidakadilan Air; Konflik Agraria.

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai perlawanan terhadap kekuasaan kolonial yang terjadi di Sukabumi pada 1907. Perlawanan ini memiliki corak gerakan mesianistik dan milenarianisme yang diasosiasikan dengan sosok Ratu Pelabuhan. Hal ini berkaitan erat dengan Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul sebagai legitimasi dari kemunculan seorang pemimpin baru. Secara umum, sumber arsip dan surat kabar memberitakan bahwa perlawanan ini dipimpin oleh Rachman dengan beberapa komplotannya sebagai seorang petani dan ahli pipa air di daerahnya.

Gerakan mesianistik sendiri merupakan gerakan sosial yang dicirikan oleh kemunculan juru selamat sebagai pemimpinnya (Angel, 2019). Gerakan mesianistik merupakan gejala sosial yang didasarkan oleh dogma agama atau kepercayaan lainnya di seluruh dunia. Agama atau ajaran yang memiliki dogma juru selamat sebagai bagian dari jawaban untuk memimpin bangsa dari keterpurukan tersebut, seperti Yahudi, Kristen, Islam, hingga Hindu (Dana, 2008). Oleh karena itu, juru selamat dalam gerakan mesiah ini menjadi sosok sentral karena perannya sebagai pengatur, pengelola, dan penentu keberadaan maupun arah gerak kelompoknya.

Konsep mesiah dalam masyarakat Jawa dan Sunda memiliki sebutannya sendiri yaitu Ratu Adil (Jawa) dan Ratu Sunda (Sunda) (Poesponegoro & Notosusanto, 2010). Pemimpin dari gerakan tersebut biasanya menyebut dirinya sebagai Ratu Adil yang akan mengantarkan masyarakat menuju kebebasan dan kemajuan. Secara historis, konsep Ratu Adil muncul di Jawa ketika masa kejayaan Hindu dengan penjelmaan Dewa Wisnu sebagai legitimasinya dan ramalan Jayabaya merupakan cerita paling terkenal mengenai Ratu Adil (Korver, 1985). Kemunculan Ratu Adil sendiri biasanya diakibatkan oleh adanya kerunyaman kondisi sosial-ekonomi di daerah tertentu yang membuat masyarakat tertekan sehingga menjadikan gerakan mesiah sebagai solusi atas ketidakstabilan tersebut (Herliany et al., 2015). Atas dasar tersebut, kita bisa melihat bahwa kemunculan Ratu Adil berkolerasi besar dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di daerah tertentu yang dilandasi oleh dogma agama.

Pembacaan Kartodirdjo (1992, 2015) dan Korver (1985) atas gerakan Ratu Adil di Jawa pada dasarnya menempatkan krisis sosial-ekonomi sebagai pemicu, tetapi keduanya masih membaca gerakan ini terutama sebagai fenomena keagamaan-politik yang berpusat pada figur juru selamat. Pembacaan ini sejalan dengan kerangka yang lebih luas dalam historiografi gerakan petani kolonial yang umum terjadi di berbagai masyarakat dunia. Hobsbawm (2010) menempatkan gerakan milenarian semacam ini sebagai "pemberontakan primitif", yakni bentuk protes pra-politis yang belum menemukan bahasa artikulasi secara matang sehingga cenderung dibaca sebagai fenomena spontan dan tidak terorganisasi. Namun, pembacaan ini telah ditantang oleh sejumlah sejarawan dan antropolog yang justru menempatkan kesadaran politik petani sebagai inti analisis.

Guha (1999) berargumen bahwa pemberontakan petani kolonial di India bukan reaksi membabi-buta terhadap penindasan, melainkan lahir dari kesadaran politik tersendiri yang otonom dari kerangka elite sebagai "kesadaran teoretis" yang lahir dari pengalaman dominasi dan subordinasi. Sejalan dengan itu, Scott (2008) menunjukkan bahwa perlawanan petani tidak selalu termanifestasi sebagai pemberontakan terbuka, tetapi seringkali berupa "senjata orang-orang lemah" sehingga acapkali luput dari catatan resmi. Kerkvliet (2018) memperluas argumen ini dengan menunjukkan bahwa "politik keseharian" petani dapat mengubah kebijakan negara meskipun tidak pernah termanifestasi sebagai gerakan terbuka yang tercatat dalam historiografi resmi. Alih-alih membaca Gerakan Rachman semata sebagai ledakan keagamaan yang pra-politis, gerakan ini dapat dibaca sebagai artikulasi kesadaran atas ketidakadilan struktural. Dalam hal ini, ketidakadilan distribusi air dibungkus dalam idiom mesianistik karena merupakan bahasa politik yang tersedia dan paling efektif memobilisasi masyarakat agraris pada zamannya. Sejauh penelusuran kami, belum ada kajian yang membaca Gerakan Rachman secara spesifik dari perspektif ketidakadilan air dengan kerangka semacam ini.

Dalam historiografi lingkungan kontemporer, konflik agraria semakin dipahami sebagai konsekuensi dari ketimpangan tata kelola sumber daya alam, bukan semata-mata akibat kelangkaan sumber daya itu sendiri. Air dipandang sebagai entitas sosio-ekologis yang dibentuk secara bersamaan oleh proses alam, kebijakan negara, relasi ekonomi, dan praktik sosial masyarakat. Oleh karena itu, distribusi air selalu mencerminkan relasi kuasa yang menentukan siapa yang memperoleh akses, siapa yang tersingkirkan, dan bagaimana ketimpangan tersebut melahirkan berbagai bentuk resistensi (Linton & Budds, 2014; Perreault, 2014). Dalam konteks kolonial, pendekatan ini memungkinkan gerakan sosial dibaca tidak hanya sebagai respons terhadap dominasi politik, tetapi juga sebagai reaksi atas ketidakadilan ekologis yang dihasilkan oleh tata kelola sumber daya yang berpihak pada kepentingan negara dan kapital

Gerakan sosial bercorak mesianistik dan milenarianisme di Hindia Belanda bukan terjadi sekali saja. Cukup banyak contoh gerakan mesianistik yang memiliki alur cerita senada walaupun hubungan kausal atas terjadinya peristiwa tersebut berbeda. Gerakan Cilegon (1888) secara umum dipimpin oleh Kyai Wasjid yang mengaku mendapatkan wahyu sebagai Ratu Adil dan kemudian menyerukan untuk melawan kafir Belanda atas pembatasan kegiatan keagamaan serta pemaksaan vaksinasi non-halal di Banten (Kartodirdjo, 1966). Adapula Gerakan Samin pimpinan Samin Surentiko sebagai sang Ratu Adil di Blora yang melawan tanpa kekerasan dengan penyebab utamanya, yaitu penolakan membayar pajak karena ketidaksepahaman atas eksploitasi tanah serta penebangan pohon jati (Abritama, 2023; Widyarsono, 1998). Dari kedua contoh tersebut saja kita dapat mengetahui bahwa penyebab adanya gerakan perlawanan memang bersifat politis dengan melawan penjajahan berlandaskan agama atau kepercayaan terhadap sang Ratu Adil, tetapi ada alasan khusus yang lebih substansial mengenai terjadinya peristiwa tersebut.

Adanya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi alam di Sukabumi ini memberikan potensi besar untuk menimbulkan letupan sosial ketika terdapat ketidakadilan atas akses unsur penghidupan oleh masyarakat luas. Sukabumi sebagai salah satu afdeeling di Residen Priangan (*Preanger Resident*) tidak luput dari usaha Hindia Belanda untuk mengeksploitasi tanah, khususnya perkebunan teh (Nugraha, 2017). Oleh karena itu, tidak mengherankan peristiwa gerakan bercorak mesianistik Rachman di Sukabumi dapat muncul karena memiliki potensi besar akibat kegiatan kolonial di sana. Perlawanan Rachman tersebut mengharuskan aparat Hindia Belanda untuk segera mengorganisir pasukan agar gerakan "makar" tidak sampai meluas ke daerah sekitarnya (Oosthout, 1907).

Konsep-konsep yang disebutkan di atas perlu diikat dalam satu kerangka analitis agar tidak berdiri sebagai istilah yang berdiri sendiri-sendiri. Penelitian ini menggunakan ekologi politik air sebagai payung teoretisnya. Swyngedouw (2009) menegaskan bahwa siklus air tidak dapat dipahami sebagai proses alamiah yang berdiri di luar masyarakat, melainkan sebagai aliran sosio-alamiah yang menyatukan unsur fisik dan sosial secara berkelindan sehingga transformasi selalu berkorelasi dengan relasi kuasa sosial, politik, ekonomi, dan kultural yang melingkupinya. Dalam kerangka yang sama, ekologi politik air merupakan kajian atas relasi kuasa yang membentuk pengetahuan dan intervensi manusia terhadap dunia air, yakni melahirkan cara-cara tertentu dalam mengatur alam dan manusia pada skala berbeda-beda guna menghasilkan tatanan sosio-hidrologis tertentu (Boelens et al., 2018). Kerangka ini memusatkan perhatian pada distribusi manfaat dan beban yang tidak setara, akses dan kontrol atas air, pihak yang diuntungkan dan dirugikan, serta hak, pengetahuan, dan kultur air yang dipersengketakan.

Berpijak pada kerangka tersebut, konflik air di Karangtengah, Sukabumi, dapat dibaca bukan sebagai persoalan teknis-distributif semata, melainkan sebagai persoalan kekuasaan oleh struktur kolonial dan kapital perkebunan. Dalam terang inilah mesianisme dan milenarianisme dibaca sebagai bahasa mobilisasi atas ketidakadilan ekologis tersebut, bukan sebagai penyebab independen dari gerakan sosial yang terjadi. Demikian pula, nativisme dan deprivasi relatif (Adas, 1985) dibaca sebagai bentuk respons kultural atas disrupsi tatanan ekologis-kosmologis akibat intervensi kolonial, bukan semata gejala psikologis kolektif yang berdiri di luar konteks material agrarianya.

Pengisahan Perlawanan Rachman di Sukabumi tidak banyak dituliskan secara mendalam. Kasus ini sempat disinggung secara ringkas dalam kajian komparatif tiga gerakan mesianistik di Hindia Belanda melalui lensa ekologi historis (Munigar & Mahzuni, 2025), tetapi pembahasan tersebut belum memberi ruang bagi penelusuran mendalam atas struktur agraria, relasi kelas antara petani dan pejabat-pemilik modal, serta korpus arsip spesifik Sukabumi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus terhadap 1) penyingkapan Pemberontakan/ Gerakan Rachman dalam wacana politis akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah kolonial; 2) analisis mendalam mengenai ketidakadilan akses air sebagai persoalan ekonomi-politik yang melibatkan relasi kelas antara petani, pejabat lokal, dan kapital perkebunan; dan 3) elaborasi konsep ketidakadilan air sebagai kerangka analitis dalam terang ekologi politik air, bukan sekadar deskripsi peristiwa.

METODE

Dalam tulisan ini kami menggunakan metode sejarah sebagai pedoman utama dalam melakukan penelitian. Metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan yang terjadi di masa lalu (Gottschalk, 2006). Tahapan dalam metode sejarah sendiri secara umum terbagi menjadi heuristik, kritik (verifikasi), interpretasi, dan historiografi (Ismaun et al., 2016). Adanya metode sejarah

sebagai pedoman utama diharapkan memberikan hasil yang terbaik dan maksimal dari penelitian ini.

Tahapan heuristik dalam penelitian ini menghimpun dua jenis sumber primer. Pertama, arsip kolonial berupa laporan resmi Residen Priangan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengenai Gerakan Rachman (Oosthout, 1907). Kedua, korpus surat kabar sezaman yang memberitakan peristiwa tersebut, terdiri atas tujuh belas artikel yang dipublikasikan antara Januari hingga Juli 1907, meliputi *Bataviasche Nieuwsblad* (empat belas artikel), *Het Nieuws van den Dag* (dua artikel), dan D*e Preanger-Bode* (satu artikel), seluruhnya diakses melalui basis data digital Delpher.nl.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi yang termuat dalam laporan resmi kolonial dengan pemberitaan surat kabar dan kesaksian yang muncul dalam proses persidangan. Triangulasi ini penting karena ketiga jenis sumber tersebut seringkali tidak sepenuhnya konsisten satu sama lain. Misalnya, antara asumsi awal pejabat kolonial mengenai motif keagamaan Rachman dan kesaksian para pengikutnya sendiri dalam persidangan yang justru menunjukkan motif lain. Dengan membandingkan titik temu dan selisih antarsumber, penelitian ini dapat mengidentifikasi bagian-bagian peristiwa yang dilaporkan secara konsisten oleh seluruh sumber, serta bagian-bagian yang justru disembunyikan, dilebih-lebihkan, atau diberi tafsir berbeda oleh masing-masing pihak yang menulisnya.

Perlu ditegaskan bahwa baik laporan Residen Priangan maupun pemberitaan surat kabar kolonial bukanlah catatan yang netral. Kedua jenis sumber ini dihasilkan oleh dan untuk kepentingan birokrasi kolonial sehingga memuat relasi kuasa tertentu dalam cara peristiwa ini direkam dan diberi makna. Laporan Oosthout (1907), misalnya, ditulis dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang harus mempertanggungjawabkan stabilitas wilayahnya kepada atasan, sehingga berpotensi menonjolkan narasi "pemberontakan" dan "fanatisme keagamaan" yang lebih mudah dipahami dan dibenarkan tindakan represifnya dibandingkan dengan motif ketidakadilan ekologis yang justru melibatkan kelalaian aparat kolonial sendiri. Demikian pula, pemberitaan surat kabar kolonial seperti *Bataviasche Nieuwsblad* ditulis oleh dan untuk pembaca Eropa di Hindia Belanda, sehingga turut mewarisi kerangka pandang yang serupa. Oleh karena itu, penelitian ini membaca sumber-sumber tersebut secara kritis dengan memperhatikan apa yang tidak dikatakan; apa yang diberi penekanan berlebih; dan bagaimana kategori-kategori tertentu digunakan untuk membingkai peristiwa.

Tahapan interpretasi dalam penelitian ini menekankan terhadap tafsir atas sumber primer dengan gejala sosial yang ada, yaitu gerakan mesiah dan milenarianisme, dibaca dalam kerangka ekologi politik air sebagaimana dijelaskan pada bagian Pendahuluan. Oleh karena itu, tulisan ini secara historiografis akan mengangkat keterhubungan antara ketidakadilan akses air dengan gerakan mesiah yang diinisiasi oleh Rachman di Sukabumi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menunjukkan bahwa Gerakan Rachman di Karangtengah, Sukabumi, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai gerakan mesianistik yang didorong oleh fanatisme keagamaan atau sentimen anti-kolonial. Melalui pembacaan atas arsip kolonial, pemberitaan surat kabar sezaman, dan hasil persidangan, penelitian ini memperlihatkan bahwa narasi mesianistik yang mengiringi kemunculan Ratu Pelabuhan justru menutupi persoalan yang lebih mendasar, yaitu ketidakadilan distribusi air yang lahir dari kolusi antara pejabat lokal dan kepentingan perkebunan. Untuk menjelaskan hubungan tersebut, pembahasan diawali dengan rekonstruksi peristiwa Gerakan Rachman, dilanjutkan dengan analisis mengenai konflik air, struktur ekonomi-politik kolonial yang melingkupinya, serta fungsi mesianisme sebagai bahasa mobilisasi atas ketidakadilan ekologis yang dialami masyarakat setempat.

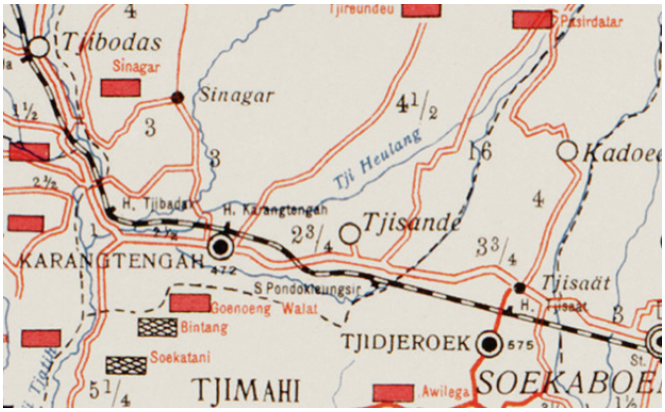
1. Kisah Singkat Ratu Pelabuhan

Tragedi dari perlawanan yang ada di Sukabumi ini dapat diidentifikasi terjadi malam hari pada 1 Januari 1907 (Anonim, 1907b). Penahanan Rachman oleh Wedana Ciheulang berlandaskan kegiatan dan klaim Ratu Pelabuhan tersebut. Wedana merasa bahwa kegiatan Rachman dengan mengatasnamakan Ratu Pelabuhan akan mengganggu stabilitas sosial-politik di sana. Pada akhirnya, Rachman pun ditangkap oleh pihak Wedana Ciheulang dan ditahan di kantornya bersama lima belas pengikutnya pada 31 Desember 1906 (Anonim, 1907c). Massa pengikut dari Rachman yang sebanyak empat belas orang menyerbu Kantor Wedana Ciheulang di Karangtengah. Massa dari pengikut Rachman tersebut menyerbu Kantor Wedana Ciheulang karena mereka menilai bahwa penahanan tersebut tidak berlandaskan keadilan (Oosthout, 1907). Dari sini kita dapat mengetahui bahwa latar belakang terjadinya kerusuhan di Sukabumi diakibatkan oleh penahanan Rachman itu sendiri.

Penyerbuan kantor Wedana Ciheulang secara mendadak membuat Sang Wedana kaget dan memilih untuk kabur ke Cibadak (Anonim, 1907a). Penyerbuan tersebut membuahkan hasil karena mereka berhasil membebaskan Rachman dan para pengikutnya yang ikut ditahan dengan cara menjebol dinding sel kantor Wedana Ciheulang. Atas tragedi tersebut, Madsan yang ketika itu bertamu ke Wedana Ciheulang terluka parah akibat diserang oleh pengikut Rachman. Selain Madsan, ada juga pelayan kolonial bernama Oeha yang mengalami luka berat akibat serangan tersebut. Serangan tersebut membuahkan hasil lebih karena pasukan Rachman dengan cepat dapat menguasai dan merusak kantor Wedana Ciheulang.

Aparat Kolonial Hindia Belanda dengan persenjataan lengkap baru sampai di lokasi kejadian pada 2 Januari 1907 (Oosthout, 1907). Pasukan bersenjata ini didampingi langsung oleh Asisten Residen Preanger, Kontrolir Cicurug, dan Patih untuk melakukan penumpasan kerusuhan di Karangtengah (Anonim, 1907a). Rachman dan pengikutnya yang berjumlah 21 orang sudah melakukan kerusuhan di Alun-Alun Karangtengah. Rachman dengan para pengikutnya menantang Pasukan Kolonial Hindia Belanda dengan menyebut mereka sebagai kafir dan babi. Selain itu, para pengikut Rachman juga yakin bahwa mereka memiliki kekuatan kebal terhadap senjata api yang menambah kepercayaan mereka untuk melawan pasukan kolonial. Para pejabat yang mendampingi pasukan bersenjata Hindia Belanda tersebut gagal untuk melakukan negosiasi dengan kelompok Rachman. Arsiep (yang juga anggota kelompok Rachman) selaku tetua bernegosiasi dan dapat membujuk kelompok Rachman lainnya untuk menuruti perintahnya agar menghentikan keributan lalu ikut dengan pejabat kolonial secara sukarela untuk diperiksa. Kelompok Rachman pun menuruti bujukan Arsiep dan mereka dibawa ke Sukabumi tanpa tangan terikat untuk diperiksa dengan jaminan akan dibebaskan jika dinyatakan tidak bersalah (Anonim, 1907a). Peristiwa Perlawanan Rachman ini pun dapat diredam oleh pihak kolonial dengan cepat dengan membawa dua puluh satu tawanan (Anonim, 1907d).

Pemberontakan Rachman merupakan suatu gejalan sosial yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari gerakan sosial. Menurut Kartodirdjo (1992) gerakan sosial sendiri memiliki tipologi yang biasanya muncul secara bersamaan, yaitu mesianistik (datangnya juru selamat), milenarianisme (utopia dengan kejayaan masa lalu), dan nativisme (unsur lokal). Penangkapan Rachman oleh Wedana Ciheulang disebabkan oleh klaim yang menyatakan bahwa Rachman merupakan seorang Ratu Pelabuhan (Anonim, 1907a, 1907d, 1907c; Oosthout, 1907). Hal ini utamanya terlihat dalam kesaksian salah satu pengikut Rachman yang mengaku bahwa Ratu Sunda telah muncul dan diasosiasikan dengan Rachman itu sendiri (Anonim, 1907e). Kesaksian ini juga sekaligus memperlihatkan bahwa konsepsi Ratu Pelabuhan berakar dari Ratu Sunda yang dapat dikatakan sejajar dengan Ratu Adil. Klaim Rachman mengenai Ratu Pelabuhan juga dibarengi dengan ilmu spiritual yang dijadikan sebagai landasan legitimasinya. Ilmu Rachman adalah menjadikan diri sebagai medium untuk berkomunikasi dengan roh yang disebut dengan ngadégdég (Oosthout, 1907). Pembuktian dari kesaktian ilmu Rachman tersebut sering kali dikaitkan dengan gejala spiritual yang dialami oleh salah satu kerabatnya. Amboe Sawi adalah salah satu kerabat dari Rachman yang mengalami gejala spiritual, yakni kesurupan. Hal ini membuatnya diyakini sudah menjadi medium untuk berkomunikasi dengan roh leluhur.



Gambar 1. Peta Karangtengah, Sukabumi (1911).
Sumber: *Leiden University Libraries (KITLV).*

Menurut pengakuan pengikutnya, jimat yang dimiliki oleh Rachman berupa cincin berbatu putih yang sering dipakai serta dirapalkan mantra-mantra (Anonim, 1907e). Hal tersebut merupakan suatu yang wajar terjadi dalam kasus gerakan sosial karena praktik untuk menggunakan jimat sebagai bagian dari keilmuan sang pemimpin gerakan kerap kali muncul sebagai bagian dari legitimasi (Kartodirdjo, 1992). Selain itu, ilmu Rachman tidak sampai di situ saja sebagai legitimasi atas klaimnya ketika menjadi Ratu Pelabuhan. Rachman juga dipercayai mengajarkan ilmu kekebalan tubuh terhadap serangan peluru. Hal tersebut jugalah yang membuat para pengikutnya berani untuk menyerang kantor Wedana Ciheulang. Dengan demikian, adanya kondisi atas klaim juru selamat tersebut telah membuat Gerakan Rachman memiliki corak mesianistik.

Selain mesianistik, gerakan sosial juga memiliki corak nativisme yang berarti gerakannya menginginkan kehidupan yang lebih baik seperti pada masa sebelumnya dengan penggunaan unsur lokalitas (Nurhasanah, 2015). Konsep dari Ratu Adil sendiri memang erat hubungannya dengan kebudayaan Jawa dan Sunda yang mengharapkan datangnya seorang mesiah atau juru selamat. Namun, hal ini juga sejalan dengan adanya ramalan dalam Islam (dan agama abrahamik lainnya) mengenai kedatangan Imam Mahdi sebagai sosok yang akan melawan kebatilan di dunia (Greisiger, 2015). Rachman sering berbicara bahwa ia sering didatangi oleh utusan Allah dan disegerakan menegakan Islam (Anonim, 1907f). Hal tersebut menunjukkan bahwa dasar dari gerakan tersebut dilegitimasi oleh kekuatan ilahi yang menjadi kepercayaan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kemunculan Ratu Pelabuhan di Sukabumi merupakan bagian dari perpaduan antara lokalitas Sunda dan keyakinan dalam Islam.

Rachman sempat mengumpulkan para pengikutnya untuk menghadiri acara selametan dengan pemujaan terhadap roh leluhur. Namun, di saat yang bersamaan muncul retorika religius dari Islam, yaitu "kafir", untuk mengasosiasikan Belanda serta para aparat kolonial lainnya. Selain kafir, kata "babi" digunakan sebagai ujaran yang menunjukkan hinaan terhadap Belanda (Anonim, 1907q). Kata "babi" sendiri memiliki kaitan erat sebagai hewan yang haram dalam ajaran Islam dan dihindari oleh muslim sehingga menjadi tabu dan dekat dengan penghinaan. Hal tersebut setidaknya memberikan stigma terhadap pemerintah kolonial sebagai bagian dari kebatilan yang harus dilawan, diusir, dan dimusnahkan.

Corak milenarianisme Rachman dapat dilihat dari keinginan Rachman untuk mendirikan kembali Kerajaan Sunda. Hal ini juga didukung oleh para pengikutnya yang percaya bahwa adanya Ratu Pelabuhan telah memberikan harapan untuk kembalinya Kerajaan Sunda berlandaskan Islam (Anonim, 1907g). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Greisiger (2015) yang menyatakan bahwa para pendukung milenarianisme biasanya mengharapkan adanya pergolakan atau revolusi (biasanya juga dikaitkan dengan kiamat) sebagai pertanda akan munculnya zaman baru. Rencana revolusi Rachman dapat dikatakan gagal secara keseluruhan karena mereka terlebih dahulu ditangkap oleh pasukan kolonial. Namun, rencana tersebut dapat dibongkar pada saat proses persidangan. Oleh karena itu, akan dijelaskan beberapa rencana Kelompok Rachman yang memiliki corak milenarianisme, khususnya mengenai pendirian Kerajaan Sunda.

Rencana Perlawanan Rachman untuk mendirikan Kerajaan Sunda adalah dengan cara mengislamkan golongan Eropa dan Tionghoa di Sukabumi secara paksa (Anonim, 1907n). Mereka yang tidak ingin diislamkan oleh kelompok Rachman akan diusir dari Sukabumi dan kembali ke negara mereka masing-masing. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Islamisasi adalah bagian revolusi yang dilancarkan oleh kelompok Rachman. Di sisi lain, Islamisasi juga merupakan cara untuk melakukan pengusiran paksa terhadap pemerintahan kolonial dari tanah Sukabumi. Selain itu, stigma negatif dari kelompok Rachman terhadap etnis Tionghoa juga terjadi dalam rencana revolusinya. Hal ini umum terjadi karena masyarakat Tionghoa dianggap sebagai kolaborator kolonial, selain mayoritas dari mereka juga tidak beragama Islam. Terlebih, masyarakat kolonial juga sering membedakan perlakuannya terhadap Golongan Tionghoa dengan Bumiputra sehingga semakin memperkuat stigma negatif dikalangan masyarakat lokal (Suryaningtyas & Weningtyastuti, 2018).

Lebih jauh lagi, keseriusan Kelompok Rachman untuk membentuk Kerajaan Sunda sudah mencapai tahap pembagian tugas dan pembangunan keraton sebagai pusat pemerintahannya. Pembangunan keraton sebagai pusat pemerintahan akan dilakukan di Pelabuhan (Anonim, 1907m). Selain itu, Rachman juga telah menentukan jabatan penting yang akan diemban oleh beberapa kerabat lainnya seperti Arsiep dan Roesmi yang sudah dijanjikan akan menjadi datu atau menteri (Anonim, 1907a).

2. Ketidakadilan Air dan Kolusi Kolonial

Sudah banyak kita ketahui bersama bahwa gerakan mesiah yang sering terjadi di Hindia Belanda pada abad XX memiliki kaitan erat dengan unsur politik. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam hal ini menjadi penyebab utama munculnya gerakan sosial. Namun, generalisasi seperti demikian dalam batasan tertentu tidak dapat menyingkap realitas secara holistik. Hal tersebut setidaknya telah mengundang perdebatan untuk menelisik lebih lanjut mengenai berbagai peristiwa sosial secara lebih mendalam.

Ratu Pelabuhan bukanlah nama yang dibuat oleh pihak kolonial ketika Pemberontakan Rachman terjadi. Nama tersebut didapat dari pengakuan Rachman yang menurut penuturannya bahwa ia adalah Ratu Pelabuhan. Sosok mesiah ini tentunya tidak dapat diterima oleh pihak kolonial, khususnya Pengadilan Kolonial. Oleh karena itu, asumsi awal para pejabat kolonial mengenai kasus ini adalah bahwa Rachman tidak

waras (Oosthout, 1907). Namun, asumsi ini memiliki satu celah besar yang menjadi suatu keanehan dalam terjadi peristiwa Pemberontakan Rachman. Pertama, bahwa pemberontakan ini tidak dipimpin oleh seorang ahli agama, bahkan dalam kelompok Rachman tidak ada seorang "haji" atau ahli agama (Anonim, 1907a). Kedua, anggota dari kelompok Rachman ini kebanyakan merupakan sanak-saudara atau kerabatnya (Anonim, 1907b). Ketiga, ketika persidangan berlangsung anggota kelompok Rachman mengaku ikut gerakan tersebut karena percaya terhadap Ratu Pelabuhan, bukan dikarenakan kekecewaan terhadap pemerintah (Anonim, 1907h).

Ketua persidangan dalam kasus Rachman ini juga memiliki kecurigaan serupa yang menyebabkan dirinya terus bertanya tentang alasan sebenarnya dari Pemberontakan Rachman ini. Akhirnya, setelah cukup lama bersidang, Halsi selaku saudara Rachman mengakui bahwa keluarga Rachman memiliki sawah di seberang lahan milik wedana, lurah, amil, dan ulu-ulu. Namun, para pejabat tersebut berkolusi dengan memindahkan aliran air ke sawah mereka sendiri sehingga menutup saluran ke sawah Rachman dan penduduk lain. Warga sempat protes kepada wedana, tetapi tidak digubris hingga sempat ada penangkapan walaupun tidak sampai ke persidangan (Anonim, 1907i). Rachman pun mengonfirmasi hal tersebut serta membenarkan bahwa ada kejadian seperti demikian sebelumnya. Pada tahap ini, pimpinan sidang mendapatkan pencerahan dan semakin yakin bahwa Pemberontakan Rachman ini dilandaskan oleh permasalahan air, bukan semata-mata fanatisme terhadap agama yang menginginkan pendirian Kerajaan Sunda.

Atas dasar itu, pimpinan sidang memerintahkan untuk segera menuliskan laporan persidangan dan menyerahkannya kepada Residen Preanger untuk ditindaklanjuti. Residen Preanger pun bertindak cepat setelah mendengar kabar tersebut, bahkan melakukan investigasi ke daerah Bojong Kawung tempat permasalah air berada. Hasil dari investigasi ternyata membenarkan adanya sabotase air oleh kelompok pejabat tersebut yang juga memberikan kesan lebih mendalam mengenai tidak adanya usaha penggulingan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di sana (Anonim, 1907k). Pada akhirnya, Wedana Ciheulang ditangguhkan dan harus menghadap Residen Preanger di Bandung untuk pengusutan kasus Pemberontakan Rachman (Anonim, 1907l).

Persidangan dilanjutkan dan berita mengenai pemecatan Wedana Ciheulang pun sudah diterima oleh pimpinan sidang. Para terdakwa kembali dikumpulkan dan pimpinan sidang memberitahu bahwa wedana dipecat sehingga kelompok Rachman diminta untuk tidak menutupi niatan mereka yang sebenarnya atas kerusuhan di Karangtengah. Akhirnya, kesaksian salah satu terdakwa bernama Tongga mengakui bahwa mereka pada dasarnya kesal terhadap wedana dan berniat membunuhnya dengan Ratu Pelabuhan, Islamisasi, dan Kerjaan Sunda sebagai dalih dari Kelompok Rachman (Anonim, 1907l). Para terdakwa akhirnya bersuara bahwa ketidakadilan air menjadi bibit mulanya Pemberontakan Rachman karena keluhan mereka sebelumnya selalu diabaikan oleh wedana (Anonim, 1907p). Persidangan selanjutnya banyak menggali perihal kondisi sawah atau ladang para terdakwa yang ternyata memang mengalami kekeringan akibat sabotase air sehingga mengalami banyak kerugian akibat gagal panen.

3. Politik Ekologi Kolonial di Sukabumi

Di sisi lain, kasus kolusi yang dilakukan oleh pejabat wedana, lurah, amil, dan ulu ternyata menyangkut juga perusahaan pabrik teh di Cireundeu. Pipa-pipa besar juga dibuat khusus untuk dialirkan ke pabrik tersebut yang membuat pasokan air semakin berkurang. Pembangunan pipa tersebut juga sempat menutup saluran air ke sawah warga di Bojong Kawung sehingga semakin memperparah kondisi irigasi di sana (Anonim, 1907o). Adanya pabrik swasta adalah hal yang wajar karena pemerintah sudah membuka lahan untuk disewakan kepada pihak swasta untuk mengelola tanah jajahan sejak akhir abad XIX sebagai liberalisasi dan percepatan perekonomian daerah jajahan (Ricklefs, 2001). Perkebunan swasta di Sukabumi sendiri memperlihatkan peningkatan pesat pada akhir abad ke-XIX dan awal XX dengan jumlah 474 perusahaan mencakup komoditas kopi, teh, dan karet (Dienaputra, 2011). Namun, nyatanya hal ini memberikan peluang besar pejabatan lokal untuk berkolusi secara terstruktur seperti yang terjadi di Sukabumi melalui Pemberontakan Rachman.

Konfigurasi ini menyingkapkan tiga lapis kepentingan yang saling menopang. Petani penggarap di Bojong Kawung, termasuk keluarga Rachman, tidak memiliki posisi administratif maupun modal sehingga menjadi pihak yang paling rentan kehilangan akses air ketika dua kepentingan lain bersaing memperebutkannya. Pejabat administrasi lokal, meliputi wedana, lurah, amil, dan ulu-ulu, memanfaatkan kewenangan resminya untuk mengatur saluran serta kebutuhan air lahan pribadi sekaligus pasokan pabrik. Adapun Pabrik Teh Cireundeu, sebagai representasi kapital perkebunan swasta, menerima manfaat langsung dari pengalihan

air tersebut tanpa perlu terlibat langsung dalam kolusi administratifnya. Di sinilah letak signifikansi membaca peristiwa ini melalui politik ekologi, bahwa persoalan ini bukan semata penyimpangan individual seorang wedana yang korup, melainkan cerminan dari struktur ekonomi-politik kolonial yang lebih luas, tempat liberalisasi agraria akhir abad XIX menciptakan insentif struktural bagi birokrasi lokal untuk berpihak pada kapital, bukan pada penduduk yang seharusnya dilayaninya.

Konfigurasi tersebut memperlihatkan bahwa air tidak pernah menjadi sumber daya yang netral, melainkan bagian dari proses pembentukan relasi sosial dan politik. Dalam perspektif *hydrosocial cycle*, perubahan aliran air selalu berjalan beriringan dengan perubahan distribusi kekuasaan, sehingga infrastruktur irigasi tidak hanya mengatur aliran air, tetapi juga menentukan siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dan siapa yang menanggung kerugiannya (Linton & Budds, 2014). Dengan demikian, pengalihan air di Karangtengah tidak dapat dipahami sekadar sebagai penyimpangan administratif oleh aparat lokal, tetapi sebagai manifestasi dari struktur ekonomi-politik kolonial yang menjadikan penguasaan air sebagai instrumen akumulasi kapital perkebunan.

Signifikansi posisi Rachman dalam konflik ini diperkuat oleh detail biografisnya sebagai petani yang juga dikenal memiliki keahlian dalam urusan perpipaan air (Anonim, 1907a). Detail ini penting karena menggeser pembacaan atas klaim-klaim Rachman dari sekadar ekspresi keagamaan menjadi penilaian yang berbasis pengetahuan teknis. Shah (2012) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan ontologis mendasar antara pengetahuan irigasi yang dianggap "tradisional" dan pengetahuan teknis "modern", yakni keduanya sama-sama merupakan kerangka pengetahuan yang valid untuk memahami dan mengelola aliran air, hanya berbeda dalam legitimasi yang menaunginya. Dalam konteks ini, Rachman dan keluarganya mengetahui adanya pengalihan aliran air ke lahan pejabat dan pabrik teh. Pengetahuan ini bukan sekadar persepsi seorang petani awam yang curiga, melainkan penilaian dari seseorang yang memahami secara teknis bagaimana sistem saluran air semestinya bekerja. Posisi ini juga menjelaskan mengapa figur ulu-ulu yang secara historis berasal dari kalangan petani sendiri dan mendapatkan otoritasnya dari pengetahuan teknis serta kearifan komunal mengenai pengelolaan air. Dengan demikian, dalam konflik Rachman, ulu-ulu menjadi titik pengkhianatan yang paling bermakna dalam struktur kolusi ini demi melayani kepentingan administratif dan kapital.

Dengan demikian, sabotase irigasi di Karangtengah memperlihatkan bagaimana kontrol atas air, menyoal siapa yang berhak menentukan ke mana ia dialirkan, senantiasa berkelindan dengan kontrol atas kekuasaan administratif dan kapital. Pertanyaan berikutnya yang perlu dijawab adalah bagaimana ketidakadilan struktural semacam ini, yang sesungguhnya bersifat material dan terukur, justru diartikulasikan melalui bahasa mesianistik oleh Rachman dan para pengikutnya.

4. Masalah Air dan Gerakan Mesianistik

Masyarakat agraris sangat bergantung terhadap keberadaan dan keberlangsungan air sehingga keperluan untuk membangun saluran air sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam merupakan hal fundamental (Primaditya, 2022). Pengelolaan sumber daya air adalah upaya dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pengevaluasian penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air (Sallata, 2015). Dengan demikian, kegagalan pemerintah Hindia Belanda di Sukabumi ini merefleksikan bahwa konservasi air dari segi pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan, dan pelestarian tidak berjalan dengan baik. Hal ini utamanya terlihat dalam keterlibatan ulu atau ulu-ulu yang malah ikut berkolusi dengan wedana. Ulu-ulu sendiri merupakan salah satu perangkat daerah pada masa Hindia Belanda yang memiliki tugas penting untuk mengatur dan mengelola saluran air (Pasandaran, 2008).

Lebih jauh, apa yang terjadi di Sukabumi dapat ditelaah sebagai bentuk dari deprivasi relatif. Menurut Adas (1985), deprivasi relatif adalah kondisi akibat gesekan antara lokalitas dengan kebudayaan luar sehingga mengakibatkan transformasi kebudayaan yang acap kali ditafsirkan sebagai bentuk keterampasan oleh masyarakat lokal. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana sengketa air diperlihatkan dengan perbedaan pandangan antara masyarakat lokal dan pihak kolonial dalam membangun saluran air. Ketidaksetujuan Rachman terhadap sikap pejabat daerah ini diejawantahkan melalui hal mistis sebagai manifestasi penolakannya terhadap sabotase saluran air oleh pejabat kolonial. Rachman mengakui bahwa roh parit dari sungai merasuk ke dalam dirinya dan memerintahkan untuk memberontak (Anonim, 1907j). Kearifan atau pengetahuan lokal mengenai penggunaan sumber daya air biasanya bersifat komunal dan terbuka dengan konsensi tanpa merugikan satu sama lain (Marfai, 2012). Dengan demikian, sengketa ini menjadi pergelutan antara kearifan lokal dengan cara pandang kapitalistik kolonial mengenai penggunaan, pelindungan, dan pengelolaan air untuk kemaslahatan orang banyak.

Pembacaan ini sekaligus menunjukkan bahwa ketidakadilan air tidak hanya bersifat distributif, tetapi juga menyangkut persoalan pengakuan (*recognition*) dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai sumber daya yang menopang kehidupan mereka. Perreault (2014) menjelaskan bahwa keadilan air (*water justice*) hanya dapat tercapai apabila distribusi sumber daya, proses pengambilan keputusan, dan pengakuan terhadap pengetahuan lokal berlangsung secara setara. Dalam kasus Sukabumi, ketiga dimensi tersebut mengalami kegagalan secara bersamaan. Air dialihkan kepada kepentingan perkebunan, keluhan masyarakat diabaikan oleh birokrasi kolonial, dan pengetahuan lokal mengenai pengelolaan air diperlakukan sebagai kepercayaan irasional. Kondisi inilah yang mendorong simbol-simbol mesianistik memperoleh legitimasi sebagai media artikulasi ketidakadilan ekologis yang tidak memperoleh ruang dalam mekanisme administrasi kolonial.

Pembacaan ini juga membantu menjelaskan secara lebih tepat sifat klaim mistis Rachman tentang roh parit sungai. Alih-alih membaca klaim tersebut semata sebagai ekspresi keagamaan yang berdiri sendiri, klaim ini dapat dipahami sebagai titik temu antara pengetahuan teknis dan idiom kosmologis. Dalam konteks ini, Rachman sebagai seorang yang memahami secara teknis bagaimana air semestinya mengalir, tidak memiliki akses pada bahasa hukum-administratif kolonial untuk mengartikulasikan protesnya. Akibatnya, ia mengartikulasikan pengetahuannya melalui kerangka kosmologis yang tersedia baginya. Kegagalan kolonial dalam pengelolaan dan konservasi air bukan hanya perihal administratif sebagaimana lazimnya dibaca, melainkan menyangkut dimensi epistemik karena pemerintah kolonial gagal mengenali keluhan yang diartikulasikan lewat bahasa mistis juga berasal dari pemahaman teknis yang sahih atas persoalan distribusi air, bukan dari ketidaktahuan atau fanatisme saja.

Dibaca melalui kerangka politik ekologi kolonial, peristiwa di Karangtengah menampakkan tiga dimensi ketidakadilan air sekaligus. Secara distributif, pengalihan air ke sawah pejabat dan pipa ke pabrik teh berdampak langsung pada pengurangan pasokan bagi sawah Rachman dan penduduk Bojong Kawung. Secara prosedural, keluhan warga kepada wedana berulang kali diabaikan, menunjukkan tidak adanya jalur partisipasi yang efektif bagi penduduk dalam keputusan distribusi air yang memengaruhi penghidupan mereka. Secara pengakuan, klaim Rachman bahwa roh parit sungai merasuk ke dalam dirinya bukan sekadar ekspresi tahayul, melainkan bahasa yang tersedia baginya untuk mengartikulasikan hilangnya hak komunal atas air yang sering kali diabaikan oleh kerangka hukum-administratif kolonial. Pada titik ketidakadilan pengakuan inilah idiom mesianistik menemukan fungsinya, seperti ketika keluhan administratif terbukti tidak didengar, klaim sebagai Ratu Pelabuhan menjadi saluran artikulasi karena lebih berpotensi menggerakkan solidaritas kolektif dibandingkan dengan aspirasi birokratis yang telah berkali-kali diabaikan. Dengan demikian, mesianisme bukan penyebab independen dari Pemberontakan Rachman, melainkan bahasa mobilisasi atas ketidakadilan ekologis yang sesungguhnya bersifat material dan struktural.

KESIMPULAN

Pemberontakan Rachman di Karangtengah, Sukabumi pada 1906 menunjukkan gejala gerakan sosial yang bercorak mesianistik, milenarianisme, dan nativisme sebagaimana lazim ditemukan dalam gerakan-gerakan serupa di Hindia Belanda. Klaim Rachman sebagai Ratu Pelabuhan memicu kecurigaan dan penangkapan oleh Wedana Ciheulang, yang pada gilirannya memicu perlawanan terbuka dari para pengikutnya. Namun, proses persidangan yang mengikuti peristiwa ini justru membongkar lapisan persoalan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar fanatisme keagamaan atau ketidakpuasan politik semata. Berdasarkan penelusuran ini, penelitian ini menghasilkan tiga jenis temuan.

Pertama, secara historiografis, penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan mesianistik-milenarian di Hindia Belanda tidak selalu didorong oleh fanatisme keagamaan atau kesadaran proto-nasionalis sebagaimana umumnya dibaca dalam historiografi gerakan sosial kolonial. Sebagaimana ditunjukkan oleh proses persidangan Rachman sendiri, kecurigaan pejabat kolonial terhadap motif keagamaan ternyata keliru dengan ketiadaan figur "haji" dalam kelompok ini, dominasi anggota keluarga dan kerabat, serta pengakuan langsung para terdakwa bahwa keluhan mereka adalah soal air, semuanya menunjukkan bahwa narasi keagamaan yang dominan dalam arsip kolonial dan pemberitaan sezaman adalah bingkai yang menyembunyikan, bukan menjelaskan, akar persoalan yang sesungguhnya.

Kedua, secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa simbol dan idiom religius dalam gerakan sosial kolonial dapat dipahami sebagai instrumen mobilisasi atas ketidakadilan ekologis, bukan sebagai penyebab

independen dari gerakan tersebut. Dalam terang ekologi politik air, klaim Rachman sebagai Ratu Pelabuhan dan pengakuannya tentang roh parit sungai bukanlah ekspresi tahayul yang berdiri sendiri, melainkan bahasa politik yang tersedia bagi masyarakat agraris untuk mengartikulasikan ketidakadilan distributif, prosedural, dan pengakuan atas air yang dialami penduduk Karangtengah dan Bojong Kawung. Temuan ini memperluas pembacaan konsep deprivasi relatif, nativisme, dan milenarianisme yang sebelumnya digunakan untuk membaca gerakan-gerakan semacam ini secara terpisah, dengan mengikatnya dalam satu kerangka analitis yang lebih koheren.

Ketiga, secara empiris, penelitian ini menemukan bahwa Pemberontakan Rachman berakar pada struktur agraria dan relasi kelas yang konkret di Karangtengah. Konflik struktur agraria dan relasi kelas direpresentasikan dari kolusi pejabat administratif lokal (wedana, lurah, amil, dan ulu-ulu) yang mengalihkan aliran air ke lahan pribadi mereka, sekaligus melayani kebutuhan pasokan air pabrik teh swasta di Cireundeu, dengan mengorbankan akses petani penggarap atas sawah mereka sendiri. Kegagalan jalur protes formal dan keluhan warga kepada wedana yang berulang kali diabaikan telah mendorong artikulasi ketidakadilan tersebut melalui klaim mesianistik. Investigasi Residen Preanger yang membenarkan adanya sabotase air, serta pemecatan Wedana Ciheulang sesudahnya, menjadi bukti konkret bahwa persoalan ini bukan rekaan, melainkan kegagalan nyata pemerintah kolonial dalam mengelola birokrasi dan konservasi sumber daya air di tingkat lokal.

Temuan ini menunjukkan bahwa konflik air di Sukabumi bukan sekadar kasus lokal, tetapi mencerminkan pola yang lebih luas mengenai hubungan antara tata kelola sumber daya, kekuasaan kolonial, dan mobilisasi masyarakat pedesaan. Dengan mengintegrasikan sejarah lingkungan dan politik ekologi, penelitian ini memperlihatkan bahwa simbol-simbol mesianistik dapat dipahami sebagai bahasa politik yang muncul ketika mekanisme formal penyelesaian konflik gagal mengakomodasi tuntutan masyarakat. Perspektif ini memperluas historiografi gerakan sosial kolonial sekaligus membuka peluang penerapan kerangka yang sama untuk mengkaji konflik agraria dan lingkungan di wilayah kolonial lainnya

Dengan tiga temuan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa unsur politik dan keagamaan dalam Pemberontakan Rachman pada dasarnya merupakan dalih dan "mantra" untuk melawan pemerintah kolonial yang gagal mengelola distribusi air secara adil. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pembacaan atas satu kasus secara mendalam dengan memperhatikan struktur agraria, relasi kelas, dan korpus arsip spesifik dapat mengungkap kompleksitas yang sukar tertangkap dalam kajian lintas kasus. Penelitian selanjutnya kiranya dapat memperluas kerangka ini ke kasus-kasus gerakan mesianistik lain di Hindia Belanda, khususnya untuk menguji sejauh mana ketidakadilan air sebagai akar struktural berlaku secara lebih luas, atau sebaliknya, bersifat spesifik pada konteks ekologis dan agraria tertentu.

REFERENSI

Abritama, P. (2023). Gerakan Samin: Konflik hutan, Ratu Adil, dan perlawanan kultural petani Blora. *Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah, 3*(2), 55–62. https://doi.org/10.31258/hjps.3.2.55-61.

Adas, M. (1985). *Ratu Adil.* Rajawali.

Angel, J. L. (2019). *Messianism/Messianic movements.* Brill. https://doi.org/10.1163/2589-7993_EECO_SIM_041888. https://doi.org/10.1163/2589-7993_EECO_SIM_041888

Anonim. (1907a, January 3). De Ratoe Pelaboehan. *Bataviasche Nieuwsblad*, 1–2. Delpher.nl.

Anonim. (1907b, January 3). Een poging tot opstand in de Preanger. *Het Nieuws van den Dag*, 1. Delpher.nl.

Anonim. (1907c, January 4). Het opstootje in de Preanger. *Het Nieuws van den Dag*, 1. Delpher.nl.

Anonim. (1907d, January 4). Ratoe Pelaboehan. *De Preanger-Bode*, 1–2. Delpher.nl.

Anonim. (1907e, June 20). Poging tot "Omverwerping" van het Nederlands gezag. *Bataviasche Nieuwsblad*, 1. Delpher.nl.

Anonim. (1907f, June 21). Poging tot "Omverwerping" van het Nederlands gezag. *Bataviasche Nieuwsblad,* 1. Delpher.nl.

Anonim. (1907g, June 22). Poging tot "Omverwerping" van het gezag. *Bataviasche Nieuwsblad*, 1. Delpher.nl.

Anonim. (1907h, June 26). Poging tot "Omverwerping" van het gezag. *Bataviasche Nieuwsblad*, 1. Delpher.nl.

Anonim. (1907i, June 27). Poging tot "Omverwerping" van het gezag. *Bataviasche Nieuwsblad,* 1–2. Delpher.nl.

Anonim. (1907j, June 28). Poging tot "Omverwerping" van het gezag. *Bataviasche Nieuwsblad*, 1–2. Delpher.nl.

Anonim. (1907k, June 29). Poging tot "Omverwerping" van het gezag. *Bataviasche Nieuwsblad,* 1–2. Delpher.nl.

Anonim. (1907l, July 3). Poging tot "Omverwerping" van het gezag. *Bataviasche Nieuwsblad,* 1. Delpher.nl.

Anonim. (1907m, July 5). Poging tot "Omverwerping" van het gezag. *Bataviasche Nieuwsblad*, 1. Delpher.nl.

Anonim. (1907n, July 10). Poging tot "Omverwerping" van het gezag. *Bataviasche Nieuwsblad*, 1. Delpher.nl.

Anonim. (1907o, July 15). Poging tot "Omverwerping" van het gezag. *Bataviasche Nieuwsblad*, 1. Delpher.nl.

Anonim. (1907p, July 16). Poging tot "Omverwerping" van het gezag. *Bataviasche Nieuwsblad*, 1. Delpher.nl.

Anonim. (1907q, July 27). Poging tot "Omverwerping" van het gezag. *Bataviasche Nieuwsblad*, 1–2. Delpher.nl.

Boelens, R., Perreault, T., & Vos, J. (Eds.). (2018). *Water justice.* Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316831847

Dana, N. (2008). *The Druze in the Middle East: Their faith, leadership, identity and status.* Sussex Academic Press.

Dienaputra, R. D. (2011). *Sunda: Sejarah, budaya, dan politik.* Sastra Unpad Press.

Gottschalk, L. (2006). *Mengerti sejarah.* Penerbit Universitas Indonesia.

Greisiger, L. (2015). Apocalypticism, millenarianism, and messianism. In A. J. Silverstein, G. G. Stroumsa, & M. Blidstein (Eds.), *The Oxford handbook of Abrahamic religions.* Oxford University Press.

Guha, R. (1999). *Elementary aspects of peasant insurgency in colonial India.* Duke University Press.

Herliany, D. R., Muhtarom, I., Suyono, S. J., Adi, W., & Darmawan, Y. (Eds.). (2015). *Ratu Adil, kuasa & pemberontakan di Nusantara.* Ombak.

Hobsbawm, E. J. (2010). *Primitive rebels: Studies in archaic forms of social movement in the 19th and 20th centuries.* W. W. Norton & Company.

Ismaun, Winarti, M., & Darmawan, W. (2016). *Pengantar ilmu sejarah.* Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah.

Kartodirdjo, S. (1966). *The peasants' revolt of Banten in 1888: Its condition, course and sequel* (Doctoral dissertation, Yale University & Universiteit van Amsterdam). https://doi.org/10.1007/978-94-015-7543-0

Kartodirdjo, S. (1992). *Ratu Adil.* Grafiti.

Kartodirdjo, S. (2015). P*emberontakan petani Banten 1888.* Komunitas Bambu.

Kerkvliet, B. J. (2018). *The power of everyday politics: How Vietnamese peasants transformed national policy.* Cornell University Press. https://doi.org/10.7591/9781501722011

Korver, A. P. E. (1985). S*arekat Islam: Gerakan Ratu Adil?* (Grafitipers, Trans.). Grafitipers.

Linton, J., & Budds, J. (2014). The hydrosocial cycle: Defining and mobilizing a relational-dialectical approach to water. *Geoforum, 57*, 170–180. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2013.10.008

Marfai, M. A. (2012). *Pengantar etika lingkungan dan kearifan lokal.* Gadjah Mada University Press.

Munigar, M. M. R., & Mahzuni, D. (2025). Lord's land God's land: A messianism-based social movement in the Dutch East Indies through a historical ecological view. *Siginjai: Jurnal Sejarah, 5*(2). https://doi.org/10.22437/js.v5i2.45708

Nugraha, S. (2017). Kota Sukabumi: Dari distrik menjadi gemeente (1815–1914). *Patanjala, 9*(3), 423–438.

Nurhasanah, A. (2015). Gerakan mesianistik Albert Dietz di Semarang tahun 1918. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Sejarah, 1*(1). https://doi.org/10.30870/candrasangkala.v1i1.745.

Oosthout, G. A. F. J. (1907). *Rapport van de Resident van Priangan (G. A. F. J. Oosthout) aan de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië* (J. B. van Heutsz) [Mailrapport]. Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasandaran, E. (2008). Membangun kerangka pengelolaan terpadu sumber daya lahan dan air: Perspektif sejarah dan politik. *Analisis Kebijakan Pertanian, 6*(4), 297–313.

Perreault, T. (2014). What kind of governance for what kind of equity? Towards a theorization of justice in water governance. *Water International, 39*(2), 233–245. https://doi.org/10.1080/02508060.2014.886843

Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (Eds.). (2010). *Sejarah Nasional Indonesia IV: Kemunculan penjajahan di Indonesia.* Balai Pustaka.

Primaditya, K. T. (2022). Modernisasi kota: Saluran air bersih perpipaan di Jawa masa kolonial. *Lembaran Sejarah, 17*(2), 171–191. https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.73174

Ricklefs, M. C. (2001). *A modern history of Indonesia since c. 1200 (3rd ed.)*. Palgrave.

Sallata, M. K. (2015). Konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan keberadaannya sebagai sumber daya alam. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 12*(1), 75–86. https://doi.org/10.20886/buleboni.5056

Scott, J. C. (2008). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press. https://doi.org/10.12987/9780300153620

Shah, E. (2012). Seeing like a subaltern: Historical ethnography of pre-modern and modern tank irrigation technology in Karnataka, India. *Water Alternatives, 5*(2), 507–538.

Suryaningtyas, A., & Weningtyastuti, R. (2018). Eksistensi dan stereotip etnis Tionghoa dalam kehidupan sosial masyarakat. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 42*(3), 235–240.

Swyngedouw, E. (2009). The political economy and political ecology of the hydro-social cycle. J*ournal of Contemporary Water Research & Education, 142*(1), 56–60. https://doi.org/10.1111/j.1936-704X.2009.00054.x

Widyarsono, A. (1998). Gerakan Samin: Perlawanan rakyat tanpa kekerasan. Unisia, 18(34), 81–95. Abritama, P. (2023). Gerakan Samin: Konflik Hutan, Ratu Adil, dan Perlawanan Kultural Petani Blora. *x*3(2), 55–62. https://doi.org/10.20885/unisia.vol21.iss36.art10.